

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA DUMAI

2023

Volume 6, 2023



KEPENDUDUKAN | KESEHATAN & GIZI |
PENDIDIKAN | KETENAGAKERJAAN | TARAF &
POLA KONSUMSI | PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA DUMAI

2023

Volume 6, 2023

KEPENDUDUKAN | KESEHATAN & GIZI |
PENDIDIKAN | KETENAGAKERJAAN | TARAF &
POLA KONSUMSI | PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DUMAI 2023

ISSN : -
Nomor Publikasi : 14730.2320
Katalog BPS : 4102004.1473

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah halaman : xiv + 62 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Ilustrasi diambil dari Freepik

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Dicetak Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai.

TIM PENYUSUN

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA DUMAI 2023**

Penanggung Jawab Umum :
Drs. Morhan Tambunan, M.Si.

Penanggung Jawab Teknis :
Memy Irwan, SST, M.S.E

Penyunting :
Aghnan Yarits Anggara, S.Tr.Stat.

Penulis :
Rahma Mutiara Sari, S.Tr.Stat.

Pengolah Data :
Aghnan Yarits Anggara, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit, Desain, dan Tata Letak :
Rahma Mutiara Sari, S.Tr.Stat.
Aghnan Yarits Anggara, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Dumai antarwaktu. Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kota Dumai 2020-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Dumai, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Dumai



Drs. Morhan Tambunan, M.Si.



DAFTAR ISI
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA DUMAI 2023

	halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
SINGKATAN DAN AKRONIM	xiii
BAB I Kependudukan	3
BAB II Kesehatan dan Gizi	17
BAB III Pendidikan	25
BAB IV Ketenagakerjaan	37
BAB V Taraf dan Pola Konsumsi	47
BAB VI Perumahan dan Lingkungan	53
ISTILAH TEKNIS	61

DAFTAR TABEL
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA DUMAI 2023

	halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk (%), dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020-2023	4
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²) Kota Dumai menurut Kecamatan Tahun 2021-2022	6
Tabel 1.3 Komposisi penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan (%) di Kota Dumai Tahun 2021-2023	8
Tabel 1.4 Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2021- 2022	10
Tabel 1.5 Persentase (%) Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2021-2022	12
Tabel 2.1 Persentase (%) Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2022	18
Tabel 2.2 Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2022	20
Tabel 2.3 Persentase (%) Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2021-2022	21
Tabel 3.1 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2022	27
Tabel 3.2 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Dumai Tahun 2021-2022	30

Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2021-2022	32
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2022	33
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Dumai Tahun 2021-2023	38
Tabel 4.2	Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021-2023	40
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2023	41
Tabel 5.1	Nilai (rupiah) dan Persentase (%) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2022-2023	48
Tabel 5.2	Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2022-2023	49
Tabel 6.1	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2021-2022	55
Tabel 6.2	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah di Kota Dumai Tahun 2021-2022	56
Tabel 6.3	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2021-2022	57
Tabel 6.4	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Dumai Tahun 2021-2022	59

DAFTAR GAMBAR
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA DUMAI 2023

	halaman
Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020-2023	5
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan (%) Kota Dumai Tahun 2020-2023	7
Gambar 1.3 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2021-2022	9
Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2022	18
Gambar 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15+ Tahun menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2021-2022	26
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kota Dumai Tahun 2018-2023	29
Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp 000) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2022-2023	48

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKDR	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	S3	Strata 3
AMH	Angka Melek Huruf	Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
APM	Angka Partisipasi Murni	SD	Sekolah Dasar
APS	Angka Partisipasi Sekolah	SMA	Sekolah Menengah Atas
BAB	Buang Air Besar	SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
BKKBN	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional	SMP	Sekolah Menengah Pertama
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	STTB	Surat Tanda Tamat Belajar
BPS	Badan Pusat Statistik	Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
DIV	Diploma Empat	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
IUD	<i>Intrauterine Device</i>	UU	Undang-undang
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah	UUD	Undang-undang Dasar
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional	WHO	<i>World Health Organization</i>
KB	Keluarga Berencana		
Kepmen	Keputusan Menteri		
km ²	kilometer persegi		
m ²	meter persegi		
MA	Madrasah Aliyah		
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan		
MI	Madrasah Ibtidaiyah		
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		
MOP	Medis Operasi Pria		
MOW	Medis Operasi Wanita		
MTs	Madrasah Tsanawiyah		
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
PBI	Penerima Bantuan Iuran		
PLN	Perusahaan Listrik Negara		
Polindes	Pondok Bersalin Desa		
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa		
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu		
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat		
Pustu	Puskesmas Pembantu		
RLS	Rata-rata Lama Sekolah		
RS	Rumah Sakit		
S1	Strata 1		
S2	Strata 2		

KEPENDUDUKAN

KOTA DUMAI



Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2023

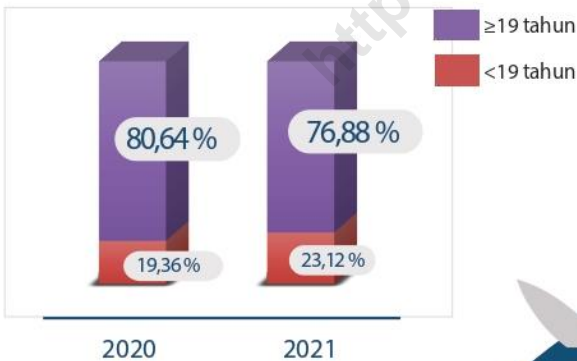


Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2023

105,25

Dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 105 s.d. 105 penduduk laki-laki.

Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2021-2022



Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kota Dumai Tahun 2023

45,73%

Setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 s.d. 46 penduduk usia tidak produktif.



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI



BAB I

Kependudukan

Isu kependudukan tak pernah terlepas dari fenomena pertumbuhan jumlah penduduk. Penduduk memang dapat berperan sebagai modal dasar (sebagai *Human Capital* berupa tenaga kerja) dalam pembangunan. Namun, di sisi lain, penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul di antaranya adalah terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan fasilitas pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi isu

yang harus menjadi perhatian pemerintah karena hal ini mampu menjelaskan beban penduduk usia produktif untuk menghidupi penduduk usia tidak produktif. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk, harus terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

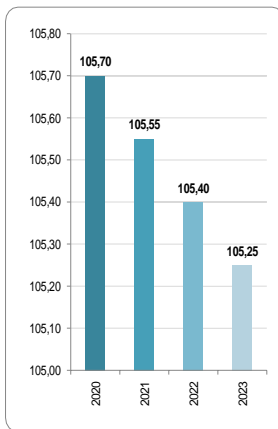
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan terus menjadi perhatian pemerintah yaitu jumlah penduduk. Saat ini, jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2020—2035 tercatat sebanyak 328.907 jiwa (Tabel 1.1). Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,30 persen bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 yang mencapai 324.678 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Dumai hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 4,09 persen. Dengan kata lain, dalam waktu empat tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Dumai telah mengalami penambahan penduduk sebanyak 12.928 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk (%), dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	315.979	-	105,70
2021	320.373	1,39	105,55
2022	324.678	1,34	105,40
2023	328.907	1,30	105,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020–2035



Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020-2023

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,30 persen atau terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai mencapai 1,39 persen, tertinggi dalam empat tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Dumai.

Dari sisi komposisi penduduk menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 105,25 (Tabel 1.1). Hal ini menunjukkan bahwa, dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 105 s.d. 106 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Dumai lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kota Dumai pada lima tahun terakhir berkisar antara 105 dan 106.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait kependudukan yang masih harus dihadapi di tingkat nasional dan juga di Kota Dumai adalah masalah ketimpangan persebaran penduduk. Ketimpangan persebaran penduduk terjadi antara di wilayah perdesaan dan perkotaan. Distribusi persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara masih ada wilayah lain yang hanya dihuni oleh sejumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat setempat karena peningkatan kualitas sumber daya manusia cenderung terjadi di wilayah yang terkonsentrasi atau padat penduduk, sementara yang tidak padat penduduk semakin

tertinggal. Wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit juga akan dihadapkan pada persoalan optimalisasi sumber daya alam yang tidak maksimal karena kurangnya tenaga kerja yang mampu meningkatkan nilai sumber daya alam yang tersedia.

Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada berbagai persoalan lain seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, meningkatnya jumlah tunawisma karena terbatasnya lahan untuk pemukiman, serta potensi penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan karena ketersediaan fasilitas yang terbatas.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk (jiwa per km²) Kota Dumai menurut Kecamatan Tahun 2021-2022

Kecamatan	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Bukit Kapur	265	161
Medang Kampai	47	113
Sungai Sembilan	44	32
Dumai Barat	1.003	1.278
Dumai Selatan	727	821
Dumai Timur	1.480	2.030
Dumai Kota	3.123	7.695
Kota Dumai	187	161

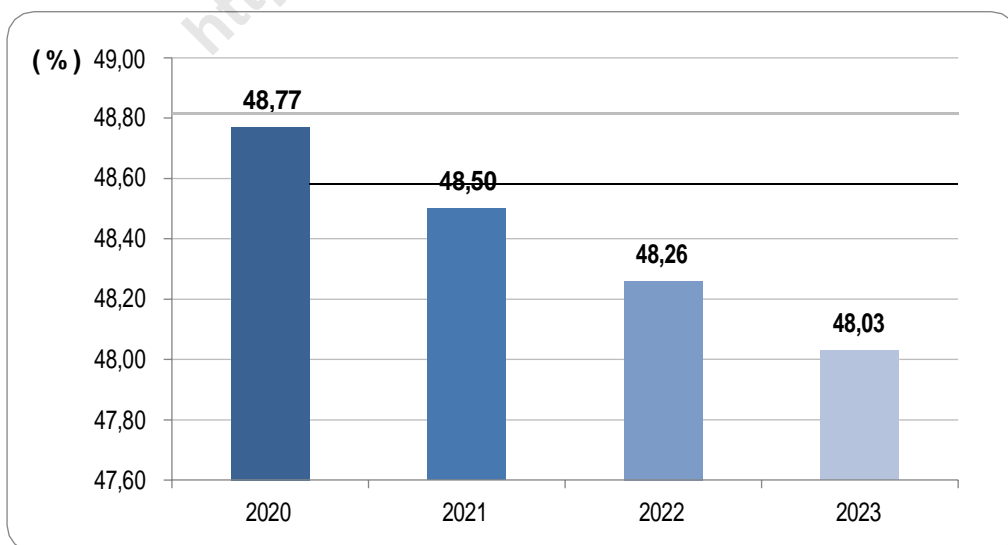
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Dumai Dalam Angka 2022-2023

Kota Dumai merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua dan luas geografis terkecil kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Kedua kota tersebut memiliki angka kepadatan penduduk lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Provinsi Riau yang sebesar 75 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kota Dumai dapat menjadi ukuran ketimpangan distribusi penduduk.

Berdasarkan kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 7.695 jiwa per km² pada tahun 2022 (Tabel 1.2). Angka ini mencapai 47 kali lipat kepadatan penduduk Kota Dumai. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 32 jiwa per km².

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang tak kalah penting. Semakin tingginya persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk menghidupi penduduk yang belum produktif (di bawah 15 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk menghidupi penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020–2035 (diolah)

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan (%) Kota Dumai Tahun 2020-2023

Berkaitan dengan komposisi penduduk menurut umur, persentase penduduk usia produktif meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 67,92 persen menjadi 68,62 persen, sehingga angka beban ketergantungan yang menurun (Tabel 1.3). Semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2020—2023, angka beban ketergantungan setiap tahun mengalami penurunan (Gambar 1.2). Pada tahun 2023, angka beban ketergantungan di Kota Dumai sebesar 48,03 persen (Tabel 1.2). Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 s.d. 49 penduduk usia tidak produktif.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2023, terdapat sekitar 27,19 persen penduduk berumur 0-14 tahun.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan (%) di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Tahun	Komposisi Penduduk (%)			Angka Beban Ketergantungan (%)
	0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	28,79	67,34	3,87	48,50
2022	28,41	67,45	4,14	48,26
2023	28,03	67,55	4,42	48,03

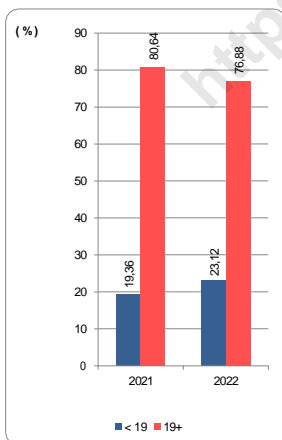
Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020–2035 (diolah)

Rasio ketergantungan yang terus menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020—2030. Pada masa tersebut, akan terdapat peluang yang lebih besar untuk terjadinya peningkatan investasi sumber daya manusia yang akan meningkatkan perekonomian melalui aktivitas produksi. Penduduk usia produktif dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain, mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang menganggur atau tidak produktif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja harus diperhatikan oleh pemerintah.

Menurunnya angka beban ketergantungan ternyata juga disebabkan penurunan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada sebanyak 28,34 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) pada tahun 2022 dan kemudian menurun menjadi 27,94 persen pada tahun 2023. Sementara itu, penduduk usia produktif semakin mendominasi. Fenomena ini mendukung hipotesis bahwa penduduk usia produktif di Kota Dumai semakin berpotensi menjadi modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin meningkat dari 4,23 persen pada tahun 2022 menjadi 4,53 persen pada tahun 2023.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan peningkatan pertambahan penduduk. Angka fertilitas yang tidak dapat terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk, sehingga jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ledakan jumlah penduduk yang terjadi akan menjadikan beban negara semakin berat dan berisiko menghambat pembangunan nasional.



Gambar 1.3 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran dari seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang

saat melakukan perkawinan pertama, semakin panjang masa reproduksinya.

Tabel 1.4 Persentase (%) Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Umur Perkawinan Pertama (tahun)	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
< 19	19,36	23,12
19+	80,64	76,88
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama, di antaranya sebagai berikut:

syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun. Pada rentang tersebut, kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar pada kelompok umur 19-20 tahun, sementara kelompok umur 21 tahun ke atas mempunyai tingkat fertilitas tertinggi. Hal ini disebabkan karena usia tersebut merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak, di mana pada usia tersebut alat reproduksi wanita sudah sangat baik dan sempurna. Selain itu, tabel tersebut juga menggambarkan bahwa terjadi pergeseran persentase wanita kawin di usia di bawah 19 tahun yang menunjukkan kecenderungan tidak baik, yaitu dari 19,36 persen pada tahun 2021 menjadi 23,12 persen pada tahun 2022. Secara umum, di Kota Dumai, sebagian besar wanita yang

pernah kawin melakukan perkawinan pertamanya pada usia 19 tahun ke atas. Salah satu pemicu pergeseran persentase tersebut adalah literasi masyarakat terkait kesehatan ibu dan bayi.

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor, utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin sedikitnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun 2021 dan 2022, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 30 persen yaitu masing-masing sebesar 49,07 persen pada tahun 2021 dan 48,19 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa

kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan risiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.5 Persentase (%) Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi Wanita / Tubektomi / MOW	5,45	6,78
Sterilisasi Pria / Vasektomi / MOP	0,43	0,61
IUD / AKDR / Spiral	4,49	6,78
Suntikan	40,58	46,26
Susuk KB / Implan	5,99	9,14
Pil	13,92	15,77
Kondom Pria / Karet KB	4,99	2,22
Intravag / Kondom Wanita / Diafragma	0,00	0,00
Metode Menyusui Alami	0,31	0,00
Pantang Berkala / Kalender	19,97	8,42
Lainnya	3,89	4,02
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022

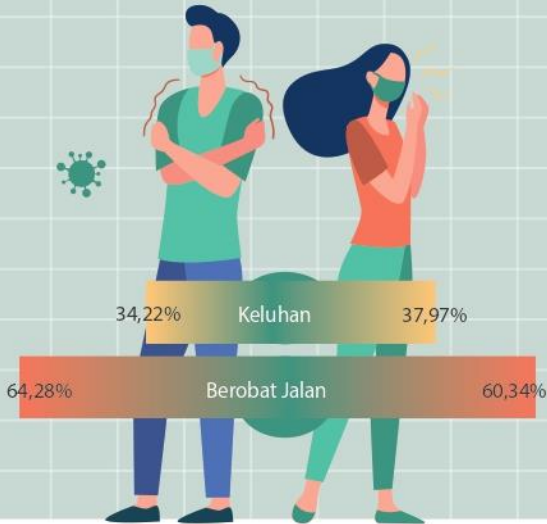
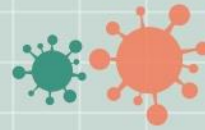
Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil merupakan yang cenderung paling konsisten diminati. Penggunaan suntikan mengalami kenaikan dari 40,58 persen pada tahun 2021 menjadi

46,26 persen pada tahun 2022. Sementara itu, penggunaan pil mengalami peningkatan persentase penggunaan dari 13,92 persen pada tahun 2021 menjadi 15,77 persen pada tahun 2022. Pergeseran persentase yang cukup signifikan terjadi pada metode penurunan penggunaan pantang berkala / kalender (dari 19,97 persen menjadi 8,42 persen). Penurunan persentase penggunaan pantang berkala/kalender harus diwaspadai karena hal ini hanya mampu mengendalikan jumlah kehamilan dalam jangka pendek.

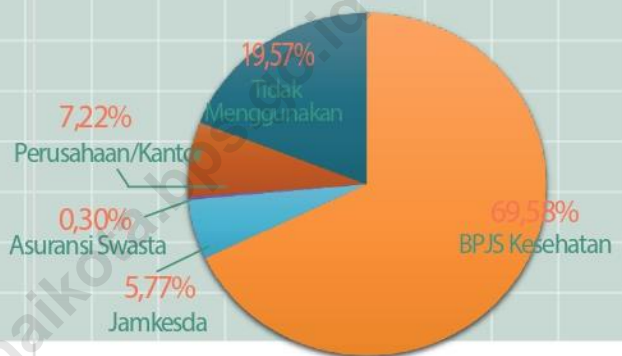
Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya atau cenderung tidak diminati di tahun 2022 adalah sterilisasi pria/ vasktomi/MOP, kondom pria/karet KB, intravag / kondom wanita / diafragma, metode menyusui alami, dan lainnya yang masing-masing persentasenya kurang dari 5 persen. Di antara alat/cara tersebut, persentase penggunaan kondom pria / karet KB adalah yang terendah penurunannya. Hal ini juga patut diwaspadai karena kondom pria / karet KB merupakan salah satu metode kontrasepsi yang dapat mengendalikan jumlah kehamilan dalam jangka panjang.



Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Penduduk yang Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2022



Persentase Penduduk menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2022



Persentase Penduduk menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2022

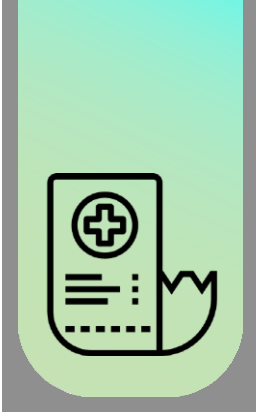


**KESEHATAN
& GIZI**



BAB II

Kesehatan & Gizi

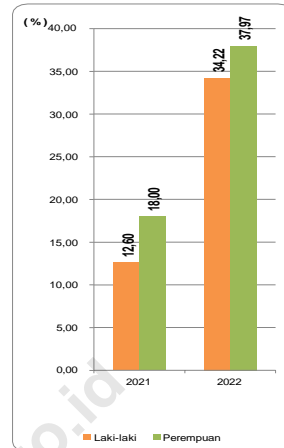


Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Masyarakat yang sehat akan mendukung proses perekonomian dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara / wilayah dengan baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya berupa kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan, seperti puskesmas, yang sasaran utamanya untuk menurunkan tingkat kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah berupa program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu & berkualitas, merata, serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk setempat, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya

gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dan semakin tinggi angka kesakitan di wilayah tersebut.



Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Hasil Susenas Maret menunjukkan persentase penduduk di Kota Dumai yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah 36,04 persen, meningkat pesat dibanding tahun 2021 yang sebesar 15,24 persen penduduk. Adapun menurut jenis kelamin, pada tahun 2022, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki (Gambar 2.1). Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan yang lebih tinggi dari pada laki-laki juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Persentase (%) Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2022

Indikator	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan	34,22	37,97	36,04
Persentase penduduk yang berobat jalan	64,28	60,34	62,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memilih mengobati keluhannya dengan berobat jalan,

yaitu mencapai 62,26 persen pada tahun 2022. Secara persentase, lebih banyak proporsi penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dan memutuskan berobat jalan, mencapai 64,28 persen, sementara proporsi penduduk perempuan sebesar 60,34 persen. Jika dikaitkan dengan indikator persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun proporsi penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan (34,22%) lebih sedikit daripada perempuan (37,97%), ternyata penduduk laki-laki lebih cenderung memutuskan untuk berobat jalan daripada perempuan.

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 yang bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial. Kepemilikan jaminan kesehatan berhubungan dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi risiko kesehatan yang akan ditanggung di masa datang. Dengan memiliki jaminan kesehatan, seseorang akan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan ketika melakukan perawatan di fasilitas kesehatan.

Kepemilikan jaminan kesehatan juga perlu diimbangi dengan pemanfaatannya. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebanyak 19,57 persen penduduk tidak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan di tahun 2022. Angka ini menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, di mana semakin sedikit proporsi penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat. Pada tahun 2020, masih terdapat sebanyak 32,04 persen yang tidak menggunakan jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan penduduk Kota Dumai pada tiga tahun terakhir adalah BPJS Kesehatan, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun

Non-PBI. Proporsi pengguna BPJS meningkat dalam tiga tahun terakhir dan mencapai 69,58 persen penduduk pada tahun 2022. Angka ini semakin membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap manfaat jaminan kesehatan semakin meningkat.

Tabel 2.2 Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2022

Jaminan Kesehatan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan	52,11	63,90	69,58
Jamkesda	3,98	0,74	5,77
Asuransi Swasta	0,00	0,69	0,30
Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor	12,10	11,00	7,22
Tidak Menggunakan Jaminan	32,04	26,54	19,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020-2022

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk. Sepanjang tahun 2022, fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan penduduk di Kota Dumai untuk berobat jalan adalah puskesmas/pustu sebesar 64,37 persen penduduk. Sementara itu, pada tahun 2021, fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan adalah praktek dokter/bidan. Jika dilihat dari peningkatan/penurunan persentasenya, fasilitas puskesmas/pustu merupakan jenis fasilitas yang semakin diminati masyarakat, sementara jenis fasilitas lainnya mengalami penurunan persentase, salah satunya praktik pengobatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat telah beralih dari pengobatan konvensional ke pengobatan medis.

Tabel 2.3 Persentase (%) Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Tempat Berobat	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	11,19	3,14
RS Swasta	2,88	0,87
Praktek Dokter/Bidan	40,00	25,05
Klinik/Praktek Dokter Bersama	22,41	6,77
Puskesmas/Pustu	31,63	64,37
UKBM*	1,54	0,00
Praktik Pengobatan Tradisional	1,79	0,44
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022

Keterangan:

*) UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

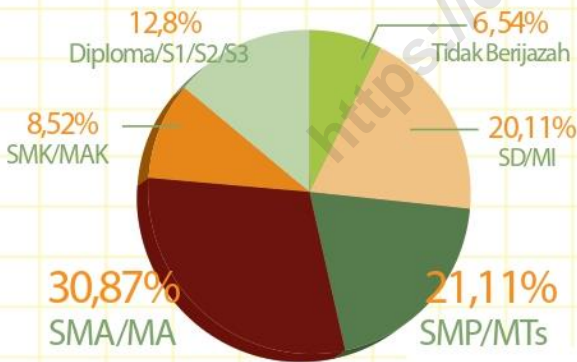
Secara menyeluruh, kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya peran tenaga kesehatan terlatih sudah tinggi, di mana hal tersebut juga merupakan salah satu indikator yang mencerminkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Dumai sudah baik. Peningkatan kesadaran masyarakat sebaiknya diiringi dengan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat juga dapat terus disosialisasikan, khususnya kepada masyarakat di wilayah perdesaan.

**Rata-rata Lama Sekolah
di Kota Dumai Tahun 2019 - 2023**



Secara rata-rata, penduduk mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMA.

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2022



**Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Latin
Kota Dumai Tahun 2022**

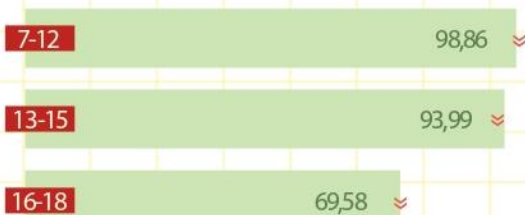


Sebanyak 99,01 persen penduduk bisa membaca dan menulis huruf latin



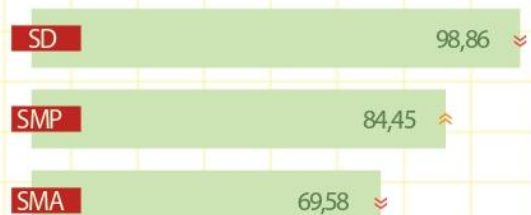
PENDIDIKAN

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)
menurut Kelompok Umur
di Kota Dumai Tahun 2022**



≈ dibandingkan tahun 2021

**Angka Partisipasi Murni (APM)
menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Dumai Tahun 2022**



≈ dibandingkan tahun 2021



BAB III

Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warganya melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan

prasarana, kurikulum, serta sumber belajar dan daya dukung lainnya juga perlu diupayakan pemerintah.

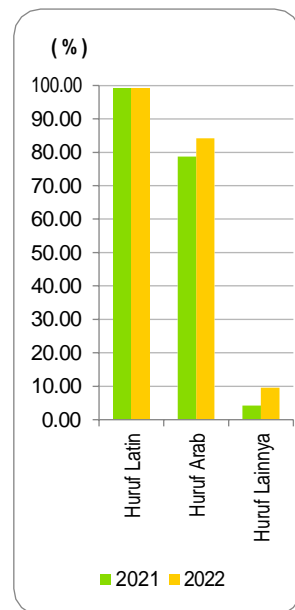
Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin serta berhitung dengan angka arab. Penyelenggaraan pendidikan, dalam pelaksanaannya memerlukan kecakapan tersebut. Selain itu, dengan kecakapan tersebut, memungkinkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya dalam pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membaca dan menulis dengan huruf latin, berhitung, serta berketerampilan. Dengan memiliki kemampuan tersebut, memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain dari pemberantasan buta huruf adalah menciptakan tenaga kerja lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya.

Di Kota Dumai, penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin adalah sebanyak 99.01 persen. Angka ini menunjukkan tingginya kemampuan membaca



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15+ Tahun menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2021-2022

dan menulis huruf latin di masyarakat. Persentase penduduk yang teridentifikasi mampu membaca dan menulis huruf latin mengalami penurunan, dari 99,17 pada tahun 2021 menjadi 99,01 pada tahun 2022. Meski demikian, persentase penduduk dengan kemampuan membaca dan menulis huruf latin masih konsisten di atas 99 persen. Adapun kemampuan membaca dan menulis huruf arab dan huruf lainnya mengalami peningkatan, masing-masingnya menjadi 84,20 persen dan 9,55 persen. Jika persentase kemampuan membaca dan menulis penduduk berdasarkan jenis kelamin diperbandingkan (Tabel 3.1), maka persentase penduduk laki-laki yang mampu membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan penduduk perempuan.

Tabel 3.1 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2022

Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis	Persentase
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	Huruf Latin	99,70
	Huruf Arab	84,43
	Huruf Lainnya	9,89
Perempuan	Huruf Latin	98,29
	Huruf Arab	83,96
	Huruf Lainnya	9,19
Laki-laki + Perempuan	Huruf Latin	99,01
	Huruf Arab	84,20
	Huruf Lainnya	9,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022 dan Susenas Maret 2022

Walaupun program pemberantasan buta huruf telah menuju arah keberhasilan, program ini harus terus dilakukan sehingga angka buta huruf masyarakat dapat terus ditekan tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan

semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta huruf dengan menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah semakin optimis bahwa angka buta huruf akan terus mengalami penurunan.

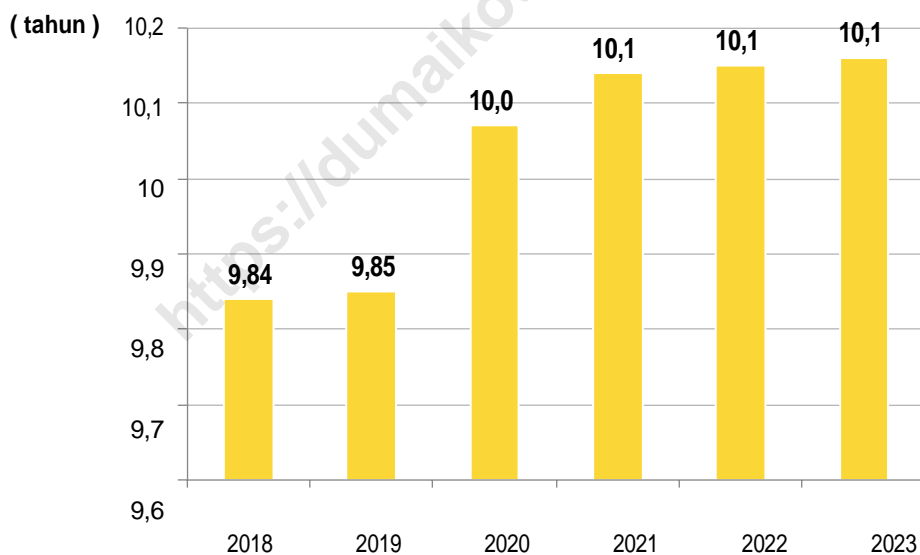
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi angka IPM, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta mempermudah akses jalan hingga ke pelosok daerah untuk menghindari anak putus sekolah. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan sekolah gratis, beasiswa bagi siswa miskin, serta penyetaraan ijazah bagi mereka yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, sehingga memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan

jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Salah satu cara efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia, khususnya di Kota Dumai, yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Upaya-upaya pemerintah dalam bidang pendidikan semakin tercermin dalam perkembangan nilai RLS dari tahun ke tahun (Gambar 3.2). Sejak tahun 2020, rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Dumai telah bersekolah lebih dari

10 tahun dengan nilai RLS di tahun 2023 sebesar 10,16 tahun. Angka ini dapat dimaknai bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Dumai mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMA/ sederajat dan memasuki kelas 2 SMA/ sederajat.

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/ keahlian yang tinggi.

Tabel 3.2 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	7,37	6,54
SD/MI	19,29	20,11
SMP/MTs	19,89	21,17
SMA/MA	29,79	30,87
SMK/MAK	9,69	8,52
Diploma I dan Diploma II	0,36	0,44
Akademi / Diploma III	3,09	1,86
DIV/S1/Profesi/S2/S3	10,52	10,50
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022

Dengan keterampilan/ keahlian yang lebih tinggi, akan semakin mudah bagi seseorang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 73,36 persen pada tahun 2022, sementara capaian pada tahun 2021 sedikit lebih rendah, yaitu 73,34 persen. Artinya, semakin besar persentase penduduk yang telah menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun di tahun 2022. Jenjang pendidikan terakhir yang paling banyak ditamatkan adalah SMA/MA yang mencapai lebih dari seperempat populasi, yaitu 30,87 persen penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2022 ijazah tertingginya SMA/MA (Tabel 3.2). Setelah SMA/MA, ijazah tertinggi berikutnya yang paling banyak dimiliki adalah SMP/MTs (21,17 persen) dan SD/MI (20,11 persen). Kondisi ini tidak jauh berbeda dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa struktur penduduk di Kota Dumai tidak mengalami banyak perubahan dari sisi pendidikan, yaitu masih didominasi oleh tamatan SMA/MA, SMP/MTs, dan SD/MI.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah mengalami penurunan dari 7,37 persen pada tahun 2021 menjadi 6,54 persen pada tahun 2022. Dari seluruh tingkat pendidikan, hanya pada tingkat pendidikan terakhir: (1) SD/MI, (2) SMP/MTs, (3) SMA/MA, serta (4) Diploma 1 dan Diploma 2 yang persentasenya meningkat, sementara pada tingkat pendidikan lainnya menurun. Peningkatan persentase tertinggi berada pada jenjang SMP/MTs di mana peningkatan persentasenya mencapai 1,28 persen dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi penduduk yang mampu menamatkan pendidikan dasar

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur di antaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Peningkatan indikator ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Kelompok Umur	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
7-12	99.53	98.86
13-15	97.26	93.99
16-18	76.00	69.58

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2021-2022

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 98,86 persen pada tahun 2022 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 99,53 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 93,99 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 97,26 persen. Adapun APS penduduk berumur 16-18 tahun mengalami penurunan dari 76,00 persen menjadi 69,58 persen. Penurunan APS pada setiap kelompok umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk usia tersebut yang terserap sistem pendidikan. Penurunan ini dikhawatirkan mengindikasikan peningkatan proporsi penduduk yang terlambat/putus sekolah di usia tersebut.

Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi yang menyebabkan kurangnya motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA dan lebih memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup karena anak usia 16-18 tahun ini telah masuk dalam usia angkatan kerja dan bekerja.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
SD	98.95	98.86
SMP	83.96	84.45
SMA	70.77	69.58

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2021-2022

Jika APS mengukur partisipasi menurut kelompok umur, maka APM mengukur partisipasi menurut jenjang pendidikan sesuai usia sekolahnya. Secara umum, APM SD pada tahun 2022 sebesar 98,86 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 98,95 persen (Tabel 3.4). Sementara itu, APM SMP mengalami peningkatan dari 83,96 persen menjadi 84,45 persen. Adapun APM SMA/SMK mengalami penurunan dari 70,77 persen menjadi 69,58 persen. Penurunan APM pada jenjang SD dan SMA menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu sesuai jenjang pendidikannya (7-12 tahun untuk SD/ sederajat dan 16-18 tahun untuk SMA/SMK/ sederajat) semakin berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena dua kemungkinan, yaitu penduduk usia sekolah semakin banyak yang berada pada jenjang yang lebih tinggi dari usianya misalnya terdapat penduduk usia 14 tahun yang sudah duduk di bangku SMA atau semakin banyak yang berada pada jenjang yang lebih

rendah dari usianya misalnya terdapat penduduk usia 16 tahun tapi masih duduk di bangku SMP.

Jika dicermati, APS dan APM menunjukkan adanya kecenderungan penurunan nilai pada setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar.

<https://dumaikota.bps.go.id>

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kota Dumai Tahun 2023

Dari setiap 100 penduduk usia
15 tahun ke atas, terdapat
66 s.d. 67 angkatan kerja.

66,07

Dari setiap 100 angkatan kerja,
terdapat 5 s.d. 6 pengangguran.

5,15

TPAK

TPT

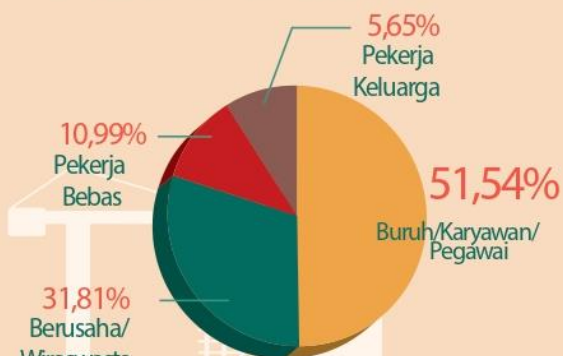
Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang
bekerja atau sementara tidak bekerja + pengangguran



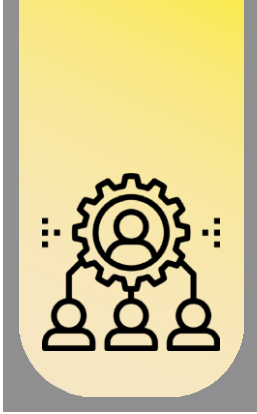
KETENAGAKERJAAN

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
yang Bekerja menurut Status Pekerjaan
di Kota Dumai Tahun 2023



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Dumai Tahun 2022-2023





BAB IV

Ketenagakerjaan

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, serta persentase pengangguran menurut

tingkat pendidikan. Dalam publikasi ini menampilkan data ketenagakerjaan tahun 2021, 2022, dan 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK	64,91	65,45	66,07
TPT	6,29	5,38	5,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2021-2023 (diolah)

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2023, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Dumai pada tahun 2023 mencapai 148.710 orang, bertambah secara absolut sebanyak 204 orang dibanding tahun 2022 (148.506 orang). Peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 diikuti dengan peningkatan persentase TPAK pada tahun 2023. Persentase TPAK mengalami peningkatan persentase sebesar 0,62 persen, dari 65,45 persen pada tahun 2022 menjadi 66,07 persen pada tahun 2023 (Tabel 4.1). Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Dumai semakin meningkat.

Sementara itu, TPT menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai 5,15 persen pada tahun 2023 (Tabel 4.1). Penurunan angka TPT pada tahun 2023 mengandung makna bahwa semakin besar proporsi angkatan kerja yang telah terserap dunia kerja. Peningkatan TPAK yang diiringi dengan penurunan TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan produktivitas penduduk angkatan kerja melalui perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja di tahun 2023.

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, selama tiga tahun terakhir, total penduduk Kota Dumai yang bekerja didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya mencapai 51,54 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022 (Tabel 4.2). Persentase penduduk yang berusaha juga mengalami kenaikan pada tahun 2023. Sementara itu, kelompok pekerja bebas mengalami penurunan persentase yaitu dari 11,22

persen menjadi 10,99 persen di tahun 2023. Adapun pekerja keluarga juga mengalami penurunan persentase menjadi 5,65 persen pada tahun 2023

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021-2023

Status Pekerjaan Utama	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	54,30	49,78	51,54
Berusaha/Wiraswasta	32,32	29,97	31,81
Berusaha sendiri	18,44	16,84	20,00
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	10,23	10,23	7,01
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,65	2,90	4,80
Pekerja bebas	4,23	11,22	10,99
Pekerja Keluarga	9,14	9,03	5,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2021-2023 (diolah)

Pola pada dua tahun terakhir dapat menjelaskan bahwa, telah terjadi pergeseran pola pekerjaan masyarakat Kota Dumai, yaitu sebagian kecil pekerja beralih menjadi buruh dan wiraswasta yang terbagi menjadi tiga, diantaranya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar. Wiraswasta dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian dalam bersikap, berpikir, dan bertindak untuk menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan menjalani karier yang sifatnya mandiri. Jenis pekerjaan wiraswasta meliputi kegiatan berdagang dan jual beli, serta penyedia jasa atau layanan tertentu. Berhubung Kota Dumai merupakan salah satu wilayah produsen kelapa sawit dan merupakan kota pelabuhan, pekerja wiraswasta di Kota Dumai umumnya bekerja di perkebunan sawit atau pelabuhan barang. Lapangan pekerjaan ini tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan tinggi, sehingga memegang kendali yang krusial dalam

penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran.

Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi dikhawatirkan menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan, sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak memiliki ijazah SD / Memiliki ijazah SD	5,83	3,43	1,33
SMP	2,20	4,51	3,69
SMA	5,82	4,24	7,30
SMK	9,28	9,47	7,07
Perguruan Tinggi	7,36	6,88	13,20
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,29	5,38	5,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2021-2023 (diolah)

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan perguruan tinggi merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun terakhir, yaitu sebesar 6,88 pada tahun 2022, meningkat

menjadi 13,20 pada tahun 2023 (Tabel 4.3). Tingginya pengangguran dari tamatan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar lulusan perguruan tinggi semakin banyak yang bekerja, baik melalui peningkatan motivasi bekerja atau melalui perluasan spesifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pada tahun 2023, TPT tertinggi berikutnya setelah tamatan perguruan tinggi adalah pada kelompok tamatan SMA yaitu sebesar 7,30 persen, diikuti kelompok tamatan SMK sebesar 7,07 persen, tamatan SMP sebesar 3,69 persen, dan terakhir tamatan SD ke bawah sebesar 1,33 persen. TPT di Kota Dumai bernilai tinggi pada kelompok tamatan perguruan tinggi dan SMK, sama halnya dengan yang terjadi pada tahun. Sementara itu, rendahnya TPT pada tamatan SD ke bawah di tahun 2023 dapat mengindikasikan bahwa para pencari kerja tamatan SD ke bawah cenderung tidak selektif terhadap jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan.

Kondisi pengangguran di Kota Dumai diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat keahlian penduduk. Pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di Kota Dumai akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pekerja dalam pembangunan. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha, sehingga dapat turut serta membangun daerahnya karena telah membantu perluasan lapangan pekerjaan baru. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan

memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

<https://dumaikota.bps.go.id>

Rata-rata Pengeluaran
Perkapita Sebulan
di Kota Dumai Tahun 2023



Rp1.642.767,00

meningkat 3,07 persen
dibandingkan tahun 2022



Pengeluaran Makanan

47,89 %

didominasi makanan
dan minuman jadi

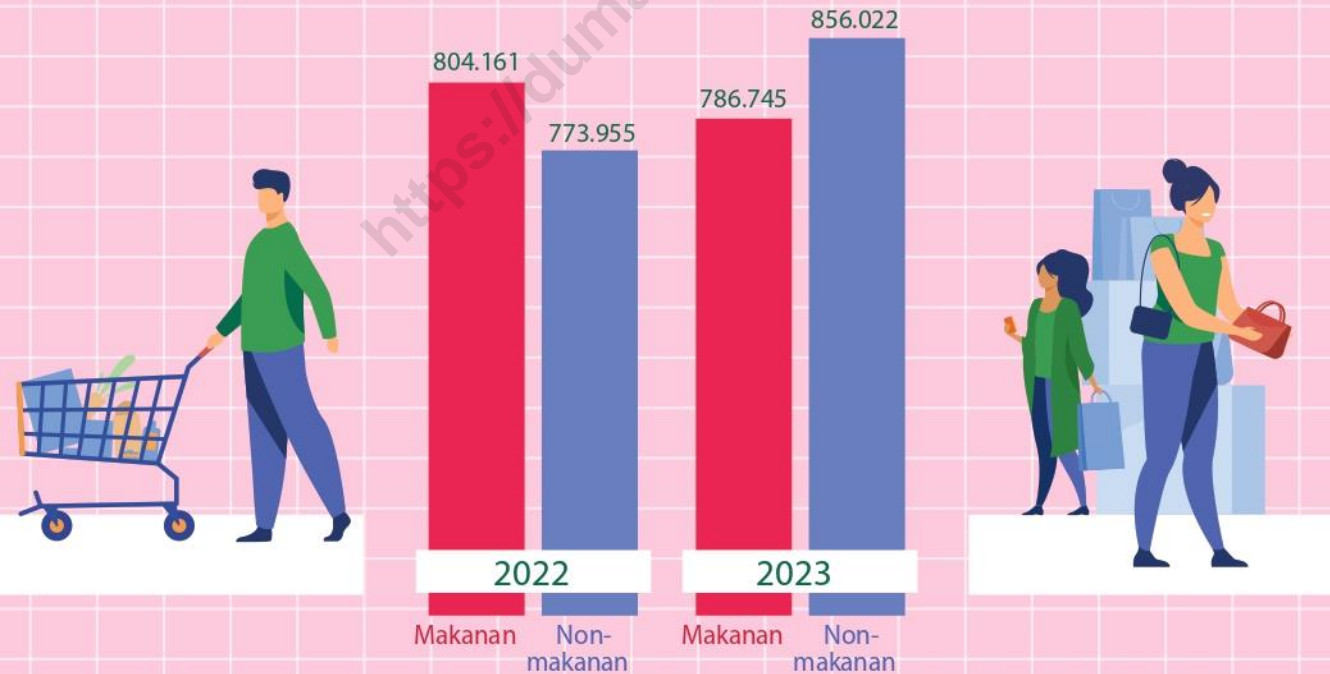


Pengeluaran Non-makananan

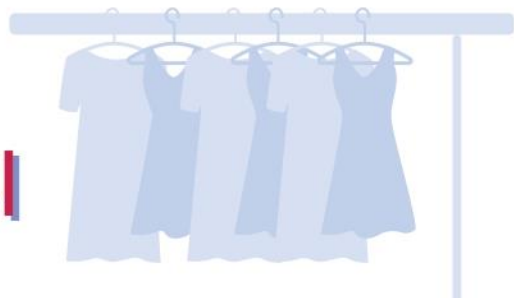
52,11 %

didominasi perumahan
dan fasilitas rumah tangga

Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp)
menurut Jenis Pengeluaran
di Kota Dumai Tahun 2022-2023



**TARAF
&
POLA KONSUMSI**





BAB V

Taraf & Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mencerminkan rumah tangga tersebut cenderung mampu memenuhi kebutuhan pokok saja, sehingga mengindikasikan rendahnya pendapatan rumah tangga. Makin tinggi pendapatan/penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk nonmakanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

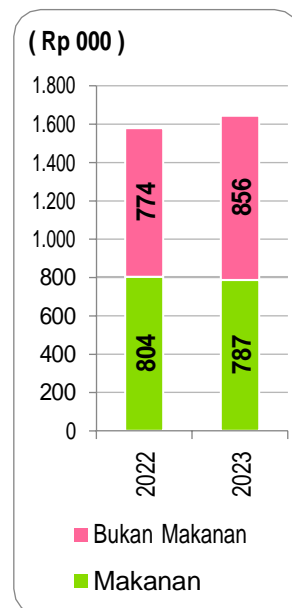
Tabel 5.1 Nilai (rupiah) dan Persentase (%) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2022-2023

Kelompok Komoditas	Nilai (Rp)		Persentase (%)	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	804.161	786.745	50,96	47,89
Bukan Makanan	773.955	856.022	49,04	52,11
Jumlah	1.578.116	1.642.767	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2022-2023

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 menyajikan data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2022 dan 2023. Dari tabel tersebut terlihat bahwa, selama periode 2022-2023, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp1.578.116,00 menjadi Rp1.642.767,00. Bila dilihat distribusinya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 50,96 persen pada tahun 2022 menjadi 47,89 persen pada tahun 2023, sehingga proporsi untuk pengeluaran bukan makanan meningkat dari 49,04 persen menjadi 52,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sumber peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk adalah dari peningkatan pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan. Peningkatan pengeluaran non makanan salah satunya disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Dumai yang menyebabkan masyarakat cenderung membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi bukan makanan daripada makanan, sehingga komposisi pengeluaran meningkat



Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp 000) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2022-2023

untuk kelompok komoditas bukan makanan.

Tabel 5.2 Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2022-2023

Kelompok Komoditas	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
A. Makanan	50,96	47,89
1. Padi-padian	4,92	4,79
2. Umbi-umbian	0,59	0,60
3. Ikan	6,25	5,72
4. Daging	2,59	2,03
5. Telur dan Susu	3,10	2,92
6. Sayur-sayuran	4,75	4,37
7. Kacang-kacangan	0,86	0,94
8. Buah-buahan	2,15	2,18
9. Minyak dan Lemak	2,25	1,63
10. Bahan Minuman	1,26	1,28
11. Bumbu-bumbuan	0,84	0,77
12. Konsumsi Lainnya	0,84	0,89
13. Makanan dan Minuman Jadi	13,14	13,44
14. Tembakau dan Sirih	7,43	6,34
B. Bukan Makanan	49,04	52,11
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,54	26,56
2. Aneka Barang dan Jasa	10,75	10,20
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,12	3,37
4. Barang yang Tahan Lama	4,29	5,82
5. Pajak dan Premi Asuransi	3,68	3,95
6. Keperluan Pesta dan Upacara	0,67	2,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2022-2023 (diolah)

Jika dirinci menurut komoditas (Tabel 5.2), maka dapat diketahui bahwa tiga komoditas makanan yang mengalami peningkatan proporsi tertinggi adalah (1) Makanan dan Minuman Jadi, (2) Kacang-kacangan, serta (3) Konsumsi lainnya yang

masing-masingnya mengalami peningkatan persentase di atas 0,30 persen atau total peningkatan ketiganya mencapai 0,42 persen. Ketiga komoditas tersebut memiliki proporsi dalam pengeluaran penduduk masing-masingnya 13,44 persen; 0,94 persen; dan 0,89 persen. Sementara itu, peningkatan proporsi pengeluaran tertinggi pada komoditas bukan makanan adalah keperluan pesta dan upacara, yaitu meningkat signifikan sebesar 1,545 persen. Keperluan pesta dan upacara memiliki proporsi 2,21 persen terhadap pengeluaran penduduk. Peningkatan dan penurunan proporsi pengeluaran menurut komoditas menunjukkan pergeseran pola konsumsi secara umum, di mana masyarakat cenderung meningkatkan belanja keperluan pesta dan upacara.

<https://dumaikota.nps.go.id>



97,10 %
rumah tangga
tinggal di rumah
beratap beton, genteng,
atau seng.

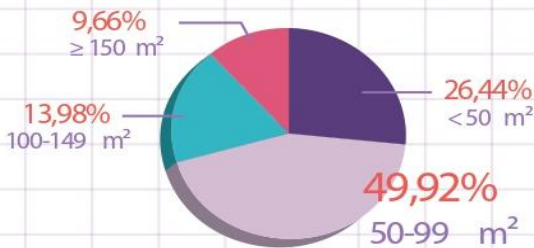
98,17 %
rumah tangga
tinggal di rumah
berlantai bukan tanah.



99,41 %
rumah tangga
tinggal di rumah dengan
dinding terluas adalah
tembok atau kayu.

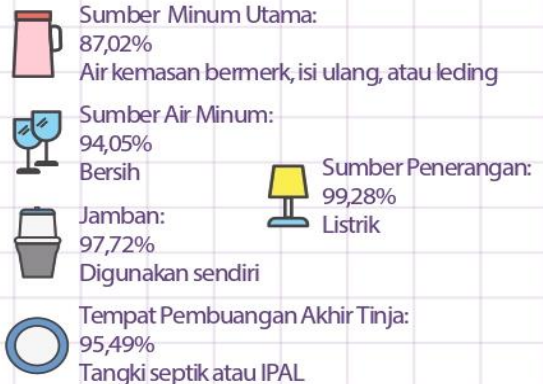
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

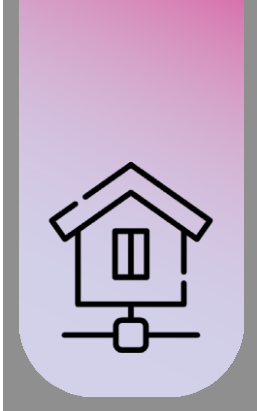
Persentase Rumah Tangga menurut
Luas Lantai Tempat Tinggal
di Kota Dumai Tahun 2022



67,52% rumah tangga
tinggal di rumah milik sendiri, sementara
sisanya di rumah kontrak/sewa,
bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya.

Persentase Rumah Tangga menurut
Beberapa Fasilitas Perumahan
di Kota Dumai Tahun 2022





Perumahan & Lingkungan

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri, bukan berarti menutup diri, melainkan memiliki tempat berlindung dari gangguan dan ancaman. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,

terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah, selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material, seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu; atap terluas dari beton, genteng, atau seng; dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Berdasarkan hasil Susenas 2021 dan 2022, secara umum, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah selalu di atas 98 persen tetapi menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2021, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,11 persen, menurun menjadi 98,17 persen pada tahun 2022 (Tabel 6.1). Nilai di atas

98 persen diartikan bahwa terdapat kurang dari dua persen saja rumah tangga yang tinggal di rumah berlantaikan tanah.

Tabel 6.1 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Lantai terluas: bukan tanah	99,11	98,17
Atap terluas: beton, genteng, atau seng	98,61	97,10
Dinding terluas: tembok atau kayu	99,12	99,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022 (diolah)

Sementara itu, jika dilihat menurut jenis atap terluas, kualitas rumah yang beratap layak telah mencapai 97,10 persen pada tahun 2022. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 98,61. Sedikit berbeda dengan indikator lantai terluas yang hampir mencapai 100 persen, rumah layak dari sisi atap terluas pada dua tahun terakhir sebanyak lebih dari 97 persen dan masih di bawah 99 persen. Perbandingan ini dapat mengindikasikan kecenderungan masyarakat Kota Dumai dalam memprioritaskan kelayakan lantai rumah daripada atap rumah.

Adapun kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok atau kayu pada tahun 2022 mencapai 99,41 persen. Capaian kualitas perumahan dari sisi dinding terluas meningkat dibandingkan tahun 2021 yang persentasenya mencapai 99,12 persen. Jika dibandingkan kembali dengan indikator sebelumnya, yaitu lantai dan atap, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Dumai pada tahun 2022 cenderung memprioritaskan kelayakan lantai rumah dan dinding rumah daripada atap rumah, meskipun capaian ketiga indikator tersebut telah mencapai persentase di atas 97 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas

lantai perorang minimal 10 m². Sementara itu, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, kebutuhan ruang perorang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak, serta ruang gerak lainnya.

Dari hasil kajian, kebutuhan ruang perorang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai perkapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Tabel 6.2 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Luas Lantai (m ²)	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
< 50	26,40	26,44
50-99	44,02	49,92
100-149	18,18	13,98
≥ 150	11,4	9,66
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020-2021 (diolah)

Pada tahun 2022, 73,56 persen penduduk Kota Dumai telah menempati rumah dengan luas lantai 50 m² atau lebih. Luas tempat tinggal didominasi pada kelompok luas 50-99 m², yaitu sebanyak 49,92 persen rumah tangga di Kota Dumai di tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 44,02 persen (Tabel 6.2). Luas lantai yang banyak ditinggali berikutnya adalah pada kelompok luas kurang dari 50 m² sebanyak 26,44 persen, kemudian kelompok luas 100-149 m², dan yang paling sedikit adalah kelompok luas 150 m² ke atas. Distribusi rumah tangga menurut luas lantai pada dua tahun terakhir tidak menunjukkan pergeseran. Jika secara rata-rata terdapat 4 orang pada setiap

rumah tangga, maka luas lantai perkapita di Kota Dumai sebagian besar telah sebesar 12,5 m² ke atas, melebihi target minimal sebesar 8 s.d. 9 m².

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.3 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Sumber minum utama: air kemasan bermerk, air isi ulang, atau leding	78,91	87,02
Sumber air minum: bersih*	90,39	94,05
Penggunaan fasilitas tempat BAB: sendiri	98,21	97,72
Tempat pembuangan akhir tinja: tangki septik atau IPAL	92,83	95,49
Sumber penerangan utama: listrik	99,65	99,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022 (diolah)

Catatan:

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat \geq 10 m]

Pada tahun 2022, rumah tangga di Kota Dumai yang menggunakan air kemasan bermerk, air isi ulang, atau air leding sebagai sumber air minum sebanyak 87,02 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 78,91 (Tabel 6.3). Peningkatan persentase tersebut juga diiringi dengan adanya

peningkatan persentase rumah tangga yang air minumnya dikategorikan bersih pada tahun 2023, dari 90,39 persen menjadi 94,05 persen. Di antara indikator kualitas perumahan yang lain, capaian pada indikator sumber minum utama merupakan capaian yang terendah. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah, mengingat sebagian wilayah Kota Dumai memiliki air tanah yang berwarna dan berbau, sehingga kurang baik jika harus dikonsumsi sebagai air minum sehari-hari karena keterbatasan akses terhadap air minum yang bersih.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air, selain juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tipus, disentri, dan kolera. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan, pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan pembuangan akhir berupa tangki septik atau IPAL.

Selama tahun 2021-2022, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri menurun dari 98,21 persen menjadi 97,72 persen. Kebutuhan akan jamban di Kota Dumai sudah tinggi yaitu diatas 97%, sehingga kebersihan fasilitas jamban tersebut lebih dapat dikendalikan. Di samping itu, tempat pembuangan akhir tinja juga mempengaruhi faktor kesehatan masyarakat. Adanya tangki septik merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga untuk memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2022, rumah tangga di Kota Dumai yang menggunakan tangki septik atau IPAL sudah di atas 95 persen, terjadi peningkatan persentase sebesar 2,66 persendari tahun 2021.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya yang bersumber dari listrik cenderung lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, sebanyak 99,65 persen rumah tangga di Kota Dumai telah menikmati fasilitas penerangan listrik, kemudian sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 99,28 persen. Terdapat kurang dari satu persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.4 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Dumai Tahun 2021-2022

Status Kepemilikan	Tahun	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	65,31	67,52
Kontrak/Sewa	22,75	18,75
Bebas Sewa	9,70	12,23
Dinas	2,24	1,49
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021-2022

Berdasarkan hasil Susenas 2022, sebanyak 67,52 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri, proporsi ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tabel 6.4). Adapun sisanya sebanyak 32.48 persen rumah tangga menempati tempat tinggal bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 18,75 persen kontrak/sewa (menurun), 12,23 persen bebas sewa (meningkat), dan 1,49 persen rumah dinas (menurun).

<https://dumaikota.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Rasio Jenis Kelamin

perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Angka Beban Ketergantungan

Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan penduduk usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk usia produktif).

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sebuah kalimat sederhana, diperoleh dari 100 dikurangi Angka Buta Huruf.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja (termasuk sementara tidak bekerja) dan menganggur.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Masih Bersekolah

Terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A/B/C).

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengangguran

Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pekerja Bebas

Seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam satu bulan terakhir).

Pekerja Keluarga

Seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/ gaji, baik berupa uang maupun barang.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Tamat Sekolah

Telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/ tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, numan, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Elastisitas Permintaan

Ukuran perubahan jumlah permintaan barang yang diakibatkan perubahan harga barang.

Sumber Air Minum Bersih

Sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m].

Luas Lantai

luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI

Jl. Tuanku Tambusai - Dumai

Telp. (0765) 4300005

Homepage: www.dumaikota.bps.go.id

Email: bps1473@bps.go.id